

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK DAN WILAYAH PENELITIAN

#### A. Deskripsi Political Jokes

Akun Instagram @politicaljokesid atau yang biasa disebut Political Jokes merupakan salah satu akun di platform media sosial Instagram. Pada awalnya, Political Jokes hadir dalam platform Line namun kemudian berkembang ke ranah Instagram dan Twitter. Konten yang diunggah di Political Jokes merupakan konten humor yang berhubungan dengan isu sehari-hari yang berhubungan dengan masyarakat serta isu politik khususnya yang terjadi di Indonesia. Political Jokes berdiri pada tahun 2015. Saat itu, terdapat tujuh mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas yang berada di wilayah Bandung merasakan keprihatinan tentang kondisi serta dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Keprihatinan ini merujuk pada kondisi politik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tingkat pemerintahan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan salah satu pendiri Political Jokes, Muhammad Iqbal yang merupakan lulusan S-1 Universitas Padjadjaran jurusan Ilmu Politik. Muhammad Iqbal berkata bahwa pada saat itu, ia dan teman-temannya merasa bahwa sumber informasi yang berkaitan dengan politik kerap diproduksi dan dikuasai oleh *mainstream media*. Banyak isu yang bersifat politis dalam satu sisi cenderung dilebih-lebihkan dan isu lain cenderung ditutupi serta tidak mendapat perhatian di media arus

utama. Atas dasar itu, ia ingin membangun media alternatif mengenai politik yang bisa dikonsumsi masyarakat.

Muhammad Iqbal menyebutkan salah satu contohnya yaitu isu mengenai konflik sengketa di Desa Wadas, Purworejo antara masyarakat dengan pemerintah yang terjadi di awal tahun 2022 lalu. Warga Wadas menolak wacana pemerintah untuk membangun kawasan pertambangan di sana. Banyak warga yang menolak melepas kepemilikan tanahnya untuk dijual kepada pemerintah. Akibat penolakan ini, pemerintah tetap melanjutkan wacana ini dan mengirim aparat keamanan di sana. Banyak warga desa yang ditangkap dan mengalami tindakan kekerasan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Berita mengenai isu konflik ini tidak mendapat tempat di media arus utama. Pergerakan perlawanan hanya terasa di media sosial. Kemudian isu yang tidak pernah menemui titik terang mengenai G30S/PKI juga tidak pernah mendapat perhatian media arus utama.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong Muhammad Iqbal dan teman-teman untuk membuat perubahan. Mereka bertujuh akhirnya membentuk Political Jokes. Political Jokes dibentuk dengan tujuan sebagai media alternatif mengenai isu politik bagi anak-anak muda. Media meme dipilih karena Muhammad Iqbal pernah membaca bahwa terdapat sebuah riset yang menyatakan ada kedekatan dan relevansi antara anak-anak muda dengan meme. Tidak mengherankan bahwa meme menjadi media yang digemari anak-anak muda sejak adanya gelaran Pemilihan Umum 2014 lalu.

Pemilihan platform Instagram juga bukan tanpa alasan. Meskipun sebelumnya hanya hadir di Line, Political Jokes kemudian melebarkan sayap di platform Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Selain itu, Instagram juga erat kaitannya dengan anak-anak muda jika dibandingkan dengan platform lain misalnya seperti Facebook. Penekanan pada unsur visual (foto dan video) yang terdapat di Instagram juga mendukung proses pembuatan dan penyebaran meme di platform ini. Hingga Agustus 2022, Political Jokes memiliki 187 ribu *followers* yang didominasi oleh anak-anak muda.

Dalam proses pembuatan dan pengunggahan konten meme, terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan Political Jokes. Pertama yaitu adanya pertimbangan mengenai urgensi pada isu yang akan dimuat pada sebuah konten. Kemudian yang kedua yaitu adanya pertimbangan mengenai relevansi pada suatu isu. Meme yang akan diunggah biasanya merupakan isu yang sedang menjadi perbincangan hangat di lingkungan sekitar mereka. Selain itu ada pertimbangan mengenai konten yang berkaitan dengan isu-isu yang cenderung tendensius dan memicu konflik. Riset juga menjadi hal yang wajib dilakukan oleh para admin Political Jokes sebelum mengangkat sebuah konten meme dengan tujuan menghindari adanya penyebarluasan berita bohong.

Muhammad Iqbal menyatakan bahwa Political Jokes sudah terbiasa mengangkat meme tentang kebijakan pemerintah yang dinilai konyol melalui meme. Meskipun begitu, Muhammad Iqbal secara khusus

menyoroti isu kebijakan pemerintah tentang pandemi COVID-19 karena pandemi merupakan kondisi darurat. Ia menilai pemerintah tidak boleh salah langkah dalam mengambil dan menetapkan suatu kebijakan di tengah kondisi negara yang darurat. Ketika ada kebijakan yang dinilai salah langkah dan merugikan rakyat yang sedang terpuruk, Political Jokes memiliki *standpoint* dengan mengambil peran sebagai oposisi. Political Jokes mengangkat isu tersebut melalui medium meme.

## **B. Problematika mengenai Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19**

Respon pemerintah Indonesia terhadap virus COVID-19 sebelum dan sesudah menyebar di Indonesia cukup banyak menyita perhatian publik. Dari awal sebelum virus COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah sudah dinilai terlalu menyepelekan penyebarannya. Hal ini dapat ditelusuri pada pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai virus COVID-19. Menteri Kesehatan saat itu, Terawan menolak pernyataan Harvard bahwa virus COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Terawan juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia berutang kepada Tuhan karena virus COVID-19 tidak masuk ke Indonesia. Dalam suatu wawancara, Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan juga menyampaikan kelakar Menteri Koordinator Perekonomian bahwa virus COVID-19 sulit masuk ke Indonesia karena perizinannya yang berbelit-belit (Mawardi,

2020). Dari berbagai pernyataan pemerintah ini dapat dilihat bahwa COVID-19 tidak dianggap pemerintah sebagai suatu ancaman.

Bermula dari pernyataan-pernyataan inilah, pesimisme masyarakat muncul terhadap kebijakan penanganan virus COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat awal virus COVID-19. Contoh nyatanya dapat dilihat dari kebijakan pemberian diskon terhadap tiket pesawat dan insentif tarif hotel di berbagai kawasan wisata, pemberian insentif terhadap para *influencer* untuk menarik wisatawan, dan berbagai kebijakan lain yang membuat masyarakat ragu terhadap kredibilitas pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan yang kusut dan gagap terutama di awal-awal masa pandemi juga terlihat dari kebijakan pemerintah pusat yang tumpang tindih dengan pemerintah daerah.

Dalam kasus ini, lembaga eksekutif menjadi lembaga yang patut disorot dalam penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan di berbagai sektor yang dirumuskan oleh lembaga eksekutif selama masa pandemi COVID-19 banyak dipertanyakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelaksanaan wewenang, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga eksekutif di masa pandemi mendapat beragam respon oleh masyarakat. Survei yang dilakukan Change.org pada bulan April 2020, di awal masa pandemi COVID-19 menyatakan bahwa 42,8% masyarakat menilai bahwa pemerintah kurang cepat dan efisien menangani pandemi. Sisanya 33,2% merasa pemerintah sudah cukup menangani

pandemi, 16,4% menganggap kinerja pemerintah mengecewakan, dan 5,6% menganggap sikap pemerintah membanggakan (Pranita, 2020). Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap pemerintah tidak kompeten menangani sektor-sektor yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan buku Vaksinasi COVID-19 di Indonesia, peneliti telah menemukan problematika terhadap empat kebijakan yang diberlakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19:

1. Integrasi Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diberlakukan pemerintah di awal masa pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi mengharuskan pemerintah memulihkan perekonomian nasional. Langkah yang dilakukan pemerintah salah satunya membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). KPCPEN memiliki lima klaster program yaitu; bidang kesehatan (insentif dan vaksin), perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dukungan UMKM dan koperasi, program prioritas (pariwisata, ketahanan pangan), dan insentif usaha (pengurangan pajak penghasilan kendaraan bermotor dan properti). Meskipun terlihat prospektif namun kebijakan ini juga tidak luput dari kritik karena alokasi anggaran yang diberikan terkesan tidak seimbang dan berat sebelah. Penekanan di bidang ekonomi yang lebih tinggi dibanding kesehatan dinilai kurang tepat diimplementasikan di awal masa pandemi. Orientasi ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah yang lebih

condong berada di sisi perekonomian dengan berfokus pada bidang pariwisata dengan memberikan berbagai stimulus dan subsidi. Sikap yang diambil pemerintah kontradiktif dengan banyak negara yang menutup jalur penerbangannya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik dan memandang langkah pemerintah tidak optimal dalam menyusun stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Beliau juga menyangkan alokasi anggaran stimulus kesehatan yang tergolong rendah dari total dana PEN, hanya berkisar 12% dari total anggaran. Alokasi anggaran ini dirasa timpang jika melihat stimulus ekonomi yang mencapai 24% dari total anggaran (Riana, 2021).

## 2. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Kebijakan PSBB yang diberlakukan pemerintah pada tahun 2020 bertujuan untuk membatasi interaksi dan mobilitas masyarakat dalam menahan laju penyebaran virus COVID-19 di masa pandemi. Secara garis besar, PSBB membatasi sekolah, tempat kerja, fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, dan kegiatan keagamaan dengan penetapan *bottom-up*. Pelaksanaan PSBB lebih dipilih pemerintah dibanding *lockdown* atau karantina wilayah yang banyak disarankan berbagai pihak. PSBB diterapkan pertama kali dilakukan oleh DKI Jakarta pada April 2020 kemudian disusul provinsi-provinsi lainnya. Berbagai kendala terjadi saat pelaksanaan kebijakan PSBB ini. Jumlah *testing* yang rendah dan rasio *tracing* yang relatif kecil menyebabkan kasus harian positif

COVID-19 semakin meningkat hingga mampu mencapai 2.000 kasus per hari di bulan Juli 2020. Kritik hadir dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang memandang PSBB terlalu birokratis karena alur koordinasi yang berbelit-belit sebelum PSBB dapat diimplementasikan pada suatu daerah (Riana, 2021).

3. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat

Pemberlakuan kebijakan PPKM mulai 11 Januari 2021 menjadi pertimbangan pemerintah setelah jumlah kasus positif COVID-19 terus menanjak secara gradual. PPKM menjadi kebijakan yang menggantikan PSBB dengan penetapan yang bersifat *top-down* oleh pemerintah pusat. PPKM juga lebih menekankan pada pendekatan kluster (aglomerasi) dan penanganan yang berfokus pada tingkat mikro. PPKM mengatur penerapan kerja dari rumah atau *work from home* dan kerja dari kantor atau *work from office*; kegiatan belajar secara *online*; pengaturan jam operasional dan kapasitas dalam fasilitas umum; serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pemerintah juga mengatur pembatasan mobilitas melalui pelarangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. PPKM Darurat menggantikan PPKM Mikro mulai 3 Juli 2021 dengan tingkat pengetatan yang lebih tinggi. Istilah bermacam-macam yang dikeluarkan pemerintah dalam membuat aturan mengenai COVID-19 membuat aturan ini dikritik. Faisal Basri, ekonom senior Universitas Indonesia mengkritik sikap pemerintah yang acap kali membuat istilah berbeda-beda saat



memberlakukan sebuah aturan setelah sebelumnya membuat istilah PSBB, PSBB transisi, *micro lockdown*, dan PPKM (Riana, 2021). Kritik juga hadir dari kalangan masyarakat yang bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi hidupnya. Bahkan pemerintah seperti tidak memiliki koordinasi yang baik satu sama lain, terlihat dari pernyataan tidak sinkron yang dilontarkan mengenai aturan mudik.

#### 4. Kebijakan dalam Peralihan Tahun 2022

Kebijakan peralihan ini diterapkan untuk mengantisipasi aktivitas masyarakat menjelang Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pemerintah memulai langkah ini dengan melakukan strategi pengetatan perbatasan negara dari jalur darat, laut, dan udara. Selanjutnya pemerintah melakukan strategi perawatan dengan menyiapkan wisma sebagai tempat karantina pasien yang terpapar virus COVID-19. Kebijakan karantina yang baru juga diberlakukan seiring meningkatnya kasus yang berasal dari perjalanan luar negeri. Penerapan kebijakan karantina ini menuai kritik karena sudah diganti sebanyak empat kali sejak Juli 2021 lalu; dari karantina 8 hari kemudian berganti ke karantina 5 hari lalu karantina 3 hari, dan yang terbaru karantina 10 dan 14 hari. Selain itu, terdapat diskresi berupa pemberian izin karantina mandiri bagi para pejabat yang baru pulang dari luar negeri, berbeda dengan masyarakat biasa yang harus karantina di tempat yang ditetapkan. Hal ini tentu menuai kritik karena ada penilaian terhadap perbedaan perlakuan yang akan memantik ketidakdisiplinan di masyarakat (Seno, 2022). Implementasi kebijakan ini di lapangan juga tidak

begitu baik karena ada beberapa sosok publik figur, baik pejabat maupun orang berpengaruh lainnya yang mencuri perhatian karena mendapat kelonggaran aturan karantina.

### **C. Meme tentang Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19 pada Political Jokes**

Seperti yang telah disampaikan oleh Muhammad Iqbal, Political Jokes secara khusus menyoroti kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Peneliti telah mengobservasi berbagai meme di Political Jokes selama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun, mulai 2 Maret 2020–17 Mei 2022. Pemilihan rentang waktu tersebut dipilih peneliti dengan menyesuaikan pernyataan Presiden Jokowi yang mencabut aturan PPKM dengan alasan menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, peneliti juga telah mengobservasi meme yang memiliki topik dan isu yang relevan dengan penelitian ini menggunakan bantuan buku Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Peneliti menggunakan buku ini untuk menelusuri berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Peneliti melakukan seleksi secara lebih spesifik terkait meme yang berkaitan dengan isu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 di Political Jokes. Peneliti telah menemukan 142 meme yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19.

Peneliti membatasi meme yang dipilih dengan secara khusus meneliti meme melalui *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan kesengajaan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018). Meme yang diteliti berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, berkaitan langsung dengan empat poin kebijakan yang tertuang dalam buku Vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022), serta mendapat banyak perhatian warganet dengan kriteria *engagement* berupa *likes* yang cukup tinggi. Dalam memastikan hasil penelitian kualitatif yang valid, diperlukan pemilihan sampel yang tepat serta relevan (Patton, 1990). Maka dari 142 meme, peneliti memilih empat meme yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian paling tinggi dengan karakteristik penelitian. Keempat meme yang dipilih mampu menjadi representasi keseluruhan objek penelitian. Keempat meme yang dipilih peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Tanggal Unggah Meme</b>	<b>Topik Kebijakan</b>
17 Maret 2020	Integrasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Kesehatan
24 April 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
14 Juli 2021	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
24 Desember 2021	Kebijakan dalam Peralihan Tahun 2022

*Tabel 2.1. Meme yang Dipilih Peneliti*  
(Sumber: Peneliti)

1. Meme tentang Integrasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Kesehatan

Orientasi pemerintah di masa awal pandemi lebih condong berada di sisi perekonomian dibanding sisi kesehatan. Kritik mengenai kebijakan ini disampaikan Political Jokes melalui meme yang diunggah pada tanggal 17 Maret 2020. Meme ini terdiri dari dua *slides* gambar yang mengambil foto televisi yang sedang menyiarkan acara berita dari stasiun televisi Global TV mengenai liburan. Pada meme ini, terlihat banyak wisatawan dari berbagai daerah memadati tempat wisata Pantai Carita. Meme ini menyindir sikap pemerintah yang menggelontorkan dana di bidang pariwisata dibanding berfokus di bidang kesehatan. Political Jokes memberikan satir kepada pemerintah dengan menambahkan *caption* “*Investasi di bidang Pariwisata ga sia-sia 👍👍👍*”. Kebijakan ini tentu dinilai kontra dengan fakta bahwa virus COVID-19 mudah menyebar di kerumunan.



**Gambar 2.1. Meme tentang Integrasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Kesehatan**  
(Sumber: Instagram Political Jokes)

## 2. Meme tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Peneliti memilih meme yang berkaitan dengan kebijakan PSBB pada meme yang diunggah pada tanggal 24 April 2020 berkaitan dengan

pemberlakuan kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah. Meme ini merupakan bentuk sindiran karena pemerintah tidak mau menetapkan *lockdown*. Berisi empat *slides*, meme ini dibuka dengan potongan artikel berita detikNews dengan judul “*Jokowi: Coba Tunjukkan Negara Mana yang Lockdown Berhasil Atasi Corona?*” disusul ketiga *slides* meme lainnya yang ‘menjawab’ pertanyaan Presiden Jokowi. Ketiga *slides* meme lainnya berisi informasi mengenai keberhasilan Vietnam dalam memberlakukan *lockdown*, terlihat pada kasus positif COVID-19 yang mengalami penurunan cukup signifikan.



**Gambar 2.2. Meme tentang PSBB**  
(Sumber: Instagram Political Jokes)

### 3. Meme tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Peneliti menggunakan meme yang diunggah pada tanggal 14 Juli 2021 sebagai respon atas aturan PPKM. Meme ini menyinggung PPKM yang menyulitkan rakyat kecil, terutama orang yang menggantungkan hidupnya pada penghasilan harian. Meme ini mengambil potongan gambar dari serial kartun *Avatar: The Last Airbender*. Meme ini menunjukkan dua

potong gambar; gambar atas mengilustrasikan pihak pemerintah dan gambar bawah mengilustrasikan pihak pedagang. Pada potongan gambar atas, pihak pemerintah diilustrasikan akan menghukum pedagang karena mereka melakukan aktivitas perdagangan yang dilarang selama aturan PPKM. Pada potongan gambar bawah, pihak pedagang membalas bahwa aturan ini tidak adil. Ilustrasi gambar bawah menggambarkan sindiran yang dilakukan pedagang kepada pemerintah. Mereka dapat dihukum karena sedang bekerja (dalam hal ini melanggar aturan PPKM) namun di sisi lain pemerintah tidak mau menjamin kehidupan mereka padahal terdapat Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan yang mengatur.

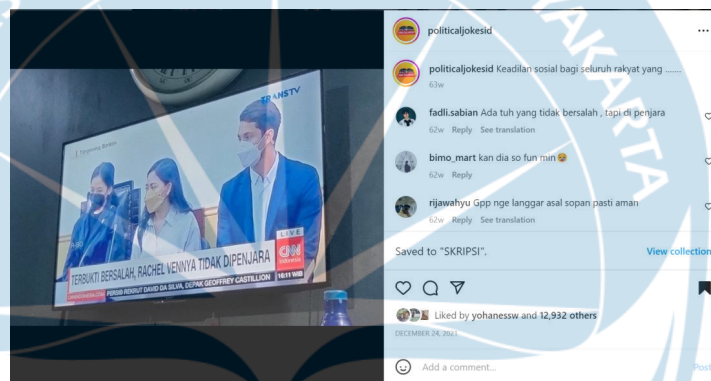


**Gambar 2.3. Meme tentang PPKM**  
(Sumber: Instagram Political Jokes)

#### 4. Meme tentang Kebijakan dalam Peralihan Tahun 2022

Meme ini diunggah pada tanggal 24 Desember 2021 yang menunjukkan foto suatu acara berita dari stasiun televisi CNN Indonesia. Judul pada acara berita ini yaitu “*Terbukti Bersalah, Rachel Vennya Tidak Dipenjara*”. Subjek yang disasar meme ini yaitu pemerintah sebagai pemegang wewenang dan otoritas kebijakan. Meme ini menilai pemerintah tidak tegas dalam menetapkan aturan karantina bagi Warga Negara

Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Padahal, pemerintah sudah merevisi aturan karantina sebanyak empat kali sejak bulan Juli 2021. Rachel Vennya, seorang *influencer* terbukti bersalah dalam melanggar aturan karantina selepas pulang dari luar negeri namun tidak dihukum atas perbuatannya. Tentu kritik keras hadir kepada pemerintah atas ketidaktegasannya dalam menetapkan aturan karantina karena dinilai tebang pilih.



**Gambar 2.4. Meme tentang Kebijakan dalam Peralihan Tahun 2022**  
(Sumber: Instagram Political Jokes)